

# KONTRIBUSI INDONESIA DALAM PEACEKEEPING MISSION DI LEBANON SEBAGAI IMPLEMENTASI DIPLOMASI PERTAHANAN

*Tsabita Afifah Khoirunnisa*  
Universitas Brawijaya

## ABSTRACT

This study aims to find out more about how the conditions in Lebanon lead Indonesia to uphold peace by mobilizing its energy in peacekeeping operations. This study shows how Indonesia has participated in participating together with the peace organization UNIFIL (United Nations Interim Force in Lebanon) in carrying out its free-active politics by sending the Garuda Contingent (KONGA) to several conflict areas in Lebanon. Indonesia's participation in this program is a manifestation of its foreign policy in the form of defence diplomacy, further this research discusses how the contingent sent by Indonesia became one of Indonesia's defence diplomacy. Defence diplomacy is one of the defence strategies that refers to ends, means, and ways that can give birth to several policies taken by Indonesia in which Indonesian defence diplomacy is a form of soft diplomacy which is one way to achieve a country's national interest

**Keywords:** *defence diplomacy, Indonesia, peacekeeping operations, confidence-building measure*

## INTRODUCTIONS

Sebagai negara yang menjunjung tinggi perdamaian, keamanan, kestabilan dan kemakmuran dunia, Indonesia memiliki peran aktif dalam menjaga perdamaian dan keamanan dunia, sesuai dengan apa yang tertulis pada konstitusi Indonesia. Hal ini sesuai dengan sifat kebijakan luar negeri Indonesia sendiri yang bersifat bebas aktif. Politik bebas aktif yang dimaksud secara garis besar dapat diartikan bahwa politik luar negeri Indonesia memiliki kebebasan tanpa adanya ikatan pada salah satu pihak dalam dunia internasional dan juga politik luar negeri Indonesia dapat secara aktif berpartisipasi dalam isu-isu global.

Sebagai negara yang memiliki politik luar negeri yang bersifat bebas aktif, Indonesia memiliki banyak pengaruh pada dunia internasional. Turut berpartisipasi dalam banyak konflik dan isu perdamaian yang ada di seluruh dunia. Isu-isu tersebut seperti konflik Rohingya yang terjadi di Myanmar, terorisme, juga isu peperangan yang sedang terjadi di Palestina dan Israel. Oleh sebab itu, maka Indonesia juga memberikan bantuannya pada Lebanon yang mana sedang mengalami konflik dengan negara tetangganya, yaitu adalah Israel sebagai bentuk usaha untuk menjaga perdamaian dunia.

Lebanon merupakan negara yang berbatasan langsung dengan negara Israel. Namun, sayangnya kedua wilayah tersebut memiliki konflik yang cukup besar hingga menyita perhatian banyak negara dan juga beberapa organisasi perdamaian. Konflik ini merupakan konflik mengenai perbatasan. Hingga akhirnya lahirlah UNIFIL (United Nations Interim Force in Lebanon) pada tahun 1978 yang bertujuan untuk mengonfirmasi mundurnya Israel dari Lebanon, mengembalikan perdamaian dan keamanan internasional, dan membantu pemerintahan Lebanon untuk kembali berdiri secara efektif untuk memerintah wilayahnya (United Nations Interim Force in Lebanon, 1978).

Sebagai salah satu bentuk kontribusi Indonesia dalam perdamaian dunia, maka Indonesia pada akhirnya memutuskan untuk mengirimkan kontingen Garuda untuk membantu menyelesaikan konflik di

Lebanon. Menurut UNFIL, Indonesia merupakan negara dengan tingkat kontribusi terbesar dalam bidang militer, terhitung pada bulan September 2021 (United Nations Interim Force in Lebanon, 1978). Bantuan yang diberikan Indonesia ini tak hanya seputar bidang militer saja, namun Indonesia juga melakukan beberapa kegiatan kebudayaan, seperti kegiatan sukarela untuk membersihkan desa dan fasilitas public, menyediakan pelatihan untuk polisi lokal, dan lain lain (Embassy of the Republic of Indonesia, 2020).

Usaha peacekeeping yang dilakukan Indonesia tidak dapat dikatakan kecil. Indonesia terus mencoba untuk memberikan pengaruhnya pada berbagai negara demi tercapainya perdamaian dunia. Adapula keuntungan yang dapat didapatkan oleh Indonesia dalam usahanya untuk mencapai perdamaian dunia. Keuntungan yang didapatkan oleh Indonesia merupakan bentuk dari soft diplomacy yang kedepannya akan membantu Indonesia dalam membangun jaringan kerjasamanya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang akan diangkat dalam makalah ini adalah “Bagaimana kontribusi Indonesia dalam peacekeeping mission di Lebanon sebagai diplomasi pertahanan yang mencerminkan politik bebas aktif?” Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan secara eksplanatif mengenai diplomasi pertahanan Indonesia melalui peacekeeping operation yang diikutinya dalam misi UNIFIL.

Kebijakan anti-*dumping* yang UE implementasikan merupakan pengenaan tarif baru terhadap velg mobil asal Tiongkok. Kebijakan ini yang hendak dideskripsikan dalam penelitian secara komprehensif dengan turut merujuk konteks-konteks anomali terkait topik penelitian ini. Berdasarkan deskripsi sebelumnya penelitian ini telah menggagas pertanyaan penelitian yaitu “***Bagaimanakah implementasi kebijakan anti-dumping oleh Uni Eropa terhadap impor velg mobil asal Tiongkok?***” Dari pertanyaan ini, penelitian ini akan mendeskripsikan jawaban analisis secara komprehensif yang sesuai relevansi data serta penggunaan teori-konsep.

## ANALYTICAL FRAMEWORK

### Diplomasi Pertahanan

Perkembangan sektor dalam ruang lingkup diplomasi telah berkembang ke dalam beberapa sektor-sektor lainnya. Salah satu sektor diplomasi yang sedang berkembang yaitu defence diplomacy. Diplomasi ini sedikit berbeda dengan diplomasi yang biasa digunakan Negara dalam mengejar kepentingan nasionalnya di level regional ataupun internasional karena diplomasi dalam sektor ini menggunakan instrumen militer sebagai aktor yang menjalankan diplomasi. Pada bagian ini, penulis akan mengeksplorasi mengenai konsep dari diplomasi pertahanan.

Literatur mengenai diplomasi pertahanan masih terus berkembang. Diplomasi dalam sektor ini mulai berkembang pada tahun 1990-an yang menyarankan untuk menggunakan kekuatan militer atau ahli bidang pertahanan untuk membantu menciptakan climate of trust dan convergence of interests (Charillon, Balzacq, & Ramel, 2020). Bentuk diplomasi ini digunakan untuk membangun mutual trust antara Blok Barat dan Blok Timur yang sebelumnya mengalami Perang Dingin sehingga dengan menjalin hubungan diplomasi militer diharapkan negara-negara dalam kedua blok sebelumnya dapat membangun kepercayaan satu sama lain. Menurut Winger, Diplomasi Pertahanan, juga dikenal sebagai diplomasi militer, adalah penggunaan kekuatan militer tanpa kekerasan melalui kegiatan seperti pertukaran perwira dan kunjungan kapal untuk memajukan agenda internasional suatu negara (Winger, 2014).

Literatur yang masih berkembang menjadikan diplomasi pertahan masih memiliki perubahan dalam kerangka konseptual. Dalam literatur terdahulu, Cottey dan Forster memaparkan bahwa diplomasi pertahanan mencakup berbagai kegiatan yang mungkin di masa lalu digambarkan sebagai kerja sama militer atau bantuan militer (Cottey & Forster, 2004). Kedua penulis juga menjelaskan bahwa negara yang

melakukan kerja sama dalam bidang pertahanan dan memberikan bantuan militer bertujuan untuk menyeimbangi atau menghalangi musuh, mempertahankan pengaruhnya, mendukung rezim yang bersahabat, ataupun mempromosikan kepentingan nasional. Menurut Seng Tan dan Singh, diplomasi pertahanan harus dilakukan dalam tiga tingkat yaitu; 1) keterlibatan dan tindakan pribadi pimpinan politik, menteri, kepala pertahanan/kepala staf umum, dan kantor pusat dan staf strategi; 2) akademi militer, pusat pendidikan, analisis dan R&D serta yang terkait dengan think tank Kementerian Pertahanan; dan 3) perwakilan dari organisasi non-pemerintah sipil (Tan & Singh, 2012).

Seiring dengan perkembangan waktu, Cheyre mengembangkan literatur yang telah dikenalkan oleh Cottey dan Forster dengan memberikan contoh kegiatan diplomasi pertahanan yang lebih luas. Diplomasi pertahanan dilakukan pada masa damai menggunakan kekuatan bersenjata dan infrastruktur terkait sebagai alat kebijakan keamanan dan kebijakan luar negeri (Saragih, 2018). Menurut Cheyre, berdasarkan perkembangan aktivitas diplomasi pertahanan di atas, diplomasi ini merupakan komponen dari diplomasi publik yang berusaha untuk mengamankan perdamaian, menjaga keutuhan wilayah negara, dan bekerja sama dalam tugas-tugas internasional yang bertujuan untuk menghindari munculnya konflik.

Dalam perkembangannya, Cheyre memberikan konsep bahwa manifestasi dari diplomasi pertahanan kini semakin luas meliputi area-area tertentu. Pertama, diplomasi pertahanan tercipta dalam organisasi angkatan bersenjata dimana anggota angkatan bersenjata mengembangkan bad-badan penasihat di setiap cabang layanan untuk menangani masalah-masalah internasional. Dalam lingkup ini, kementerian pertahanan dan masing-masing dinas memprakarsai kegiatan internasional yang bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dengan angkatan bersenjata lain, organisasi internasional, dan badan-badan negara lain (Cheyre, 2013). Di samping itu, menurut Cheyre, militer harus mengembangkan kapasitas penasihat yang diperlukan untuk memberikan input bagi kementerian luar negeri untuk menganalisis strategis tertentu.

Kedua, diplomasi pertahanan juga meliputi pengiriman defence attaches (DA). Defence attaches atau military attaches merupakan representatif militer suatu negara yang dikirim ke negara asing untuk memberikan nasihat dan rekomendasi pertahanan kepada kedutaan besar. Pada hari ini, mandat yang diberikan kepada representatif meluas sebagai penasihat kepala misi tentang cara terbaik untuk melanjutkan kerja sama pertahanan dengan negara tuan rumah dan sebagai coordinator dari lebih banyak pertukaran pertahanan internasional dalam bentuk pelatihan, operasi, latihan bersama, kontrol bilateral, konferensi tematik, logistik, dan bahkan PKOs. Dengan keterampilan dan pengetahuan mereka, militer memainkan peran yang lebih signifikan ketika berinteraksi dengan rekan-rekan asing mereka, yang membantu memperkuat hubungan militer dengan militer dan mungkin berkontribusi pada hubungan yang lebih baik antar negara (Inkiriwang, 2021). Peran utama dari DA antara lain; 1) mengadvokasi kepentingan militer atau keamanan negaranya; 2) mewakili otoritas militer negaranya kepada negara penerima; 3) menyediakan kebijakan keamanan dan jaringan militer yang dapat beroperasi dalam keadaan sulit; 4) bertindak sebagai penasihat militer kepada duta besar dan stafnya; 5) mengobservasi kondisi dalam negara penerima dan melaporkannya kepada negaranya; 6) mengawasi dan mengelola kegiatan di bidang penjangkauan militer, diplomasi pertahanan, dan kerjasama keamanan; 7) mempromosikan industri persenjataan negaranya dalam kasus-kasus tertentu; dan 8) melopori tanggap darurat dan upaya bantuan ketika krisis muncul (Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces, 2007). DA juga dapat berperan sebagai penyelenggara military dialogue, yang dipertahankan selama masa damai melalui 'kerja sama militer, tentara asing dilatih oleh yang lain, kunjungan atau persinggahan tentara di negara tertentu, latihan militer bersama yang digunakan sebagai pertukaran pembelajaran untuk menciptakan iklim kesadaran dan kepercayaan timbal balik antara otoritas dan personel dari dua atau beberapa tentara, dan melalui peningkatan hubungan interpersonal antara tentara' (Charillon et al., 2020).

Ketiga, diplomasi pertahanan juga meliputi Peacekeeping Operations (PKOs) yang dijalankan di bawah naungan PBB. Beberapa alasan negara berpartisipasi dalam operasi ini yaitu; untuk mensubsidi Sebagian dari gaji angkatan bersenjata dan untuk membiarkan angkatan bersenjata memperoleh pengalaman tempur di kehidupan nyata. Partisipasi dalam operasi ini merupakan peluang luar biasa untuk menghubungkan dan berbagi pengalaman, di lapangan, dengan angkatan bersenjata lainnya, dan untuk mengembangkan jaringan yang berharga (Cheyre, 2013). Menurut Ebitz, angkatan bersenjata memiliki key role dalam penyebaran demokrasi, membangun kekuatan negara mitra melalui hubungan militer-ke-militer, pertukaran personel, dan operasi humanitarian assistance (Cheyre, 2013).

Selanjutnya, diplomasi pertahanan juga meliputi pertukaran pelajar atau educational exchange. Hal ini dikarenakan karena banyak Angkatan bersenjata dari negara berkembang menciptakan kontak dengan emerging powers di masa ini untuk menyiapkan diri menghadapi tantangan baru di lingkup pertahanan dan untuk meningkatkan kemampuan mereka. Kemudian, diplomasi pertahanan juga meliputi konferensi internasional. Hal ini tercipta dalam pertemuan tematik dan seminar tingkat tinggi yang padat dalam membahas isu-isu strategis, politik, atau operasional membuat agenda tahunan yang padat bagi pejabat senior pemerintah dan perwira militer yang bertanggung jawab atas diplomasi pertahanan (Cheyre, 2013). Terakhir, diplomasi pertahanan juga bergerak pada bidang bisnis dan logistik, yang mana aktivitasnya meliputi pembelian senjata dan peralatan militer, pengembangan industri pertahanan, pertukaran ilmu pengetahuan dan teknologi, pencarian mitra dalam usaha produksi bersama, dan sistem logistik dan pasokan untuk angkatan bersenjata (Cheyre, 2013).

Berbagai kegiatan diplomasi pertahanan yang telah disebutkan sebelumnya dapat dikatakan bahwa diplomasi pertahanan pada masa ini tidak hanya memperkuat kerja sama tetapi juga memungkinkan negara-negara besar untuk ‘membentuk dan mempengaruhi’ perkembangan negara-negara lemah dan untuk membantu mereka menangani tantangan keamanan mereka (Laksamana, 2011). Dalam bentuk diplomasi pertahanan yang baru ini, bentuk diplomasi ini memiliki peran utama yaitu; 1) strategic engagement sebagai alat untuk mengurangi potensi konflik dengan mantan dan musuh potensial; 2) mempromosikan hubungan demokratis militer-sipil; dan 3) mendukung negara lain dalam perkembangan kapabilitas peacekeeping (Laksamana, 2011).

Idil Syawfi dalam penelitiannya, menyebutkan secara parsial tiga karakteristik utama dalam diplomasi pertahanan. Ia menjelaskan bahwa keberhasilan strategi diplomasi pertahanan suatu negara merupakan kolaborasi dari komponen diplomasi, pertahanan, dan pembangunan (Syawfi, 2009). Tiga karakter tersebut yaitu; 1) Defence diplomacy for Confidence Building Measures; 2) Defence diplomacy for defence capabilities; dan 3) Defence diplomacy for industry Defence diplomacy for confidence. Penjelasan mengenai tiga karakteristik ini dikembangkan oleh beberapa ahli, salah satunya Budi Pramono. Menurut Budi Pramono, diplomasi pertahanan setidaknya harus memiliki tiga karakteristik utama dalam mengejar kepentingan nasional. Karakteristik yang pertama yaitu diplomasi ini harus meningkatkan Confidence Building Measure (CBM), dimana diplomasi ini harus menciptakan lingkungan strategis yang kondusif karena melalui karakteristik ini dapat menentukan the nature of cooperation yang dikembangkan oleh nagara lain. Kegiatan CBM ini menekankan pada usaha untuk membangun hubungan yang baik dengan negara lain untuk saling berbagi persepsi, membentuk iklim kondusif secara bilateral dan transparan (Pramono, 2020). Dalam konteks CBM, diplomasi pertahanan dapat mengurangi tegangan dari mutual suspicion dan mutual threat sehingga perkembangan dan pembangunan militer suatu negara tidak diinterpretasi salah oleh negara lain melalui komunikasi, pembatasan, transparansi, dan verifikasi (Pramono, 2020).

Selanjutnya, diplomasi pertahanan harus meningkatkan kapabilitas pertahanan. Hal ini dikarenakan kemunculan kekuatan militer dalam sistem internasional dapat mempengaruhi aspek tawar-menawar sehingga kepentingan nasional pada era modern membutuhkan kehadiran dari kapabilitas militer.

Terakhir, Pramono menjelaskan bahwa diplomasi pertahanan harus meningkatkan pembangunan kapabilitas industri pertahanan yang setidaknya mencapai Minimum Essential Force (MEF). Minimum Essential Force merupakan kekuatan pokok minimum sebagai bagian dari postur TNI untuk merespon ancaman aktual terhadap pertahanan negara, yang mana kebijakan ini muncul sebagai respon pemerintah akan masalah pertahanan negara, yang dilakukan dengan cara pembangunan postur pertahanan berbasis tiga hal yaitu gelar (*deployment*), kemampuan (*capability*), dan kekuatan (*force*) (Astrina, Retno, & Santoso, 2012). MEF dibangun sebagai strategi pembangunan kekuatan Komponen Utama menuju ideal yang mana tidak diarahkan pada konsep *arms race* tetapi sebagai suatu bentuk kekuatan pokok yang memenuhi standar tertentu. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertahanan No. 19 Tahun 2012 tentang Kebijakan Penyelerasan Minimum Essential Force Komponen Utama menjelaskan bahwa Pembangunan MEF ini dirancang berdasarkan pada 1) skala prioritas dalam menghadapi ancaman aktual dengan tidak mengesampingkan ancaman potensial (*threat-based design*); 2) kemampuan yang menjadi kemandirian (*capability-based defence*); 3) berdasarkan pada penganggaran sesuai kemampuan ekonomi negara; dan 4) dapat terwujudnya faktor penggentar (*deterrence factor*) sebagai bagian dalam mewujudkan saling percaya dengan negara sahabat CBM. Berdasarkan hal tersebut, dengan dilakukannya diplomasi pertahanan Indonesia dengan negara lain dapat memenuhi kebutuhan MEF, karena melalui diplomasi pertahanan dapat melakukan *joint-trade* untuk pemenuhan Alutista yang dapat memeningkatkan *confidence building measure*, kapabilitas pertahanan, dan kapabilitas industri pertahanan. Adanya pembangunan dalam industri ini, menciptakan peluang yang lebih luas untuk meningkatkan kapabilitas dalam bentuk kualitas sumber daya, teknologi, produksi, dan pemasaran sehingga dapat menciptakan lapangan kerja yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kapabilitas industri pertahanan domestik, dan menciptakan sinergi dengan industri pertahanan di luar negeri. Melalui tiga karakteristik di atas, Pramono menjelaskan bahwa diplomasi pertahanan dapat menjadi alat yang bermanfaat untuk memperkuat kehadiran negara melalui pendekatan militer dan kerja sama strategis melalui diplomasi ini merupakan peluang yang baik untuk negara meningkatkan profesionalisme militer-nya (Pramono, 2020).

Penelitian ini secara spesifik menggunakan konsep dan gagasan teoritis yaitu neo-liberalisme-institusionalisme berdasarkan *cooperation under anarchy*. Teori dari *cooperation under anarchy* ini menjelaskan bahwa hubungan internasional identik diwarnai dengan signifikansi peran organisasi internasional dan berbagai bentuk kerja sama regional yang mendorong integrasi (Hadiwinata, 2017). Penelitian ini secara aktual menggunakan teori *pay off structure* yang juga bersumber dari neo liberalisme-institusionalisme berdasarkan *cooperation under anarchy*.

Dalam penjelasannya, Kenneth Oye mendeskripsikan bahwa *pay off structure* mengandung beberapa karakter yaitu kecenderungan manusia untuk jujur atau curang akan membentuk harmoni atau pengkhianatan, pemberian insentif atau sanksi yang tepat untuk meningkatkan kerja sama saling menguntungkan dan menghindari situasi saling mengkhianati dan resiprositas atau hubungan timbal balik antar aktor (Hadiwinata, 2017). Dalam mendeskripsikan penelitian ini strategi dalam *pay off structure* yang tepat adalah strategi multilateral. Strategi ini menginisiasi dan mempengaruhi pembentukan rezim internasional dengan insentif serta sanksi yang jelas untuk menciptakan harmoni dalam kerja sama antar negara (Hadiwinata, 2017).

Untuk mendeskripsikan topik serta jawaban pertanyaan penelitian, metode kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Jawaban yang dideskripsikan adalah penjabaran komprehensif dengan menghadirkan jawaban bagi gagasan topik dan deskripsi pemaknaan baru. Penelitian ini secara spesifik menggunakan metode analisis narasi berdasarkan disiplin ilmu hubungan internasional. Penggunaan metode analisis narasi

bertujuan untuk menghasilkan deskripsi pemaknaan baru dari semua sumber data sebagai realitas aktual. Ragam-ragam sumber data berasal dari cerita otobiografi, teks dokumen lapangan, jurnal, catatan, dan foto (Bakry, 2017).

Studi pustaka turut digunakan dalam penelitian ini sebagai teknik pengumpulan data. Artikel ilmiah merupakan hasil akhir dari pengolahan himpunan seluruh data. Seluruh data dalam penelitian ini secara dominan bersumber dari data sekunder antara lain dari: artikel, jurnal, buku dan informasi berita terutama dalam jaringan (*online*) (Bakry, 2017). Sedangkan, periode waktu penelitian ini adalah dari tahun 2019 hingga 2020.

### **Diplomasi Pertahanan dalam Studi Strategi**

Diplomasi pertahanan umumnya dilakukan oleh institusi pemerintahan di bidang pertahanan demi mencapai kepentingan nasional, terutama dalam bidang pertahanan dan keamanan (Samy & Kusumadewi, 2021). Menurut Andrew Cottey dalam mengembangkan diplomasi pertahanan, terdapat tiga peran baru militer dalam kerangka diplomasi pertahanan, yaitu *strategic engagement* untuk mencegah konflik dan untuk mengembangkan apa yang disebut saling percaya (*Confidence Building Measures/CBM*), mempromosikan hubungan sipil-militer yang demokratis, dan memperkuat kapabilitas pemeliharaan perdamaian (Cottey & Forster, 2004). Jika diibaratkan sebagai dua sisi mata uang, pertama, diplomasi pertahanan dapat berperan sebagai mata uang kepentingan nasional dan kedua sebagai mata uang perdamaian regional dan global (Umma, 2019).

Konsep diplomasi pertahanan tersebut seakan menjelaskan bagaimana perilaku strategis negara dalam menyikapi multipolarisasi dunia yang ternyata membawa politik luar negeri ke tantangan baru, yaitu di antaranya adanya distribusi *world power*, serta prinsip *non-boundary* yang tidak lagi berpusat pada dua blok klasik (Timur dan Barat). Hal ini menjadi tantangan yang memberikan peluang bagi setiap negara khususnya Indonesia untuk membangun hubungan yang lebih konstruktif dalam mengembangkan kepentingan negara baik di bidang ekonomi, sosial budaya dan pertahanan. Aktualisasi diplomasi pertahanan sebagai kebijakan nasional harus sejalan dengan kepentingan negara, terutama dalam upaya mempertahankan stabilitas domestik yang erat kaitannya dengan situasi regional. Hal ini merupakan kemampuan diplomasi suatu entitas negara yang dapat berkomunikasi secara efektif untuk menjalin hubungan antar negara (Pramono, 2020).

Kemudian jika melihat bagaimana diplomasi pertahanan akan diimplementasikan di Indonesia, terdapat beberapa negara mitra strategis Indonesia perlu mendapatkan penanganan yang sistematis dan terprogram secara komprehensif sesuai dengan karakter diplomasi pertahanan, yaitu *Confidence Building Measure (CBM)*, peningkatan kemampuan pertahanan dan pengembangan industri pertahanan. Maka dari itu, pemerintah perlu mengembangkan relevansinya dengan menggali diplomasi pertahanan sebagai ujung tombak untuk memperkuat eksistensi bangsa dan negara Indonesia (Pramono, 2020)

Dapat disimpulkan bahwa bentuk diplomasi pertahanan Indonesia memiliki tiga jenis pertahanan bilateral diplomasi: (i) diplomasi pertahanan untuk langkah-langkah membangun kepercayaan, (ii) diplomasi pertahanan untuk peningkatan kemampuan pertahanan, dan (iii) diplomasi pertahanan untuk pengembangan industri pertahanan (Laksamana, 2011). Oleh karena itu diplomasi pertahanan yang dimaksud dalam tulisan ini dan akan dibahas lebih lanjut dalam analisis studi kasus adalah diplomasi

pertahanan Indonesia dalam misi peacekeeping UNIFIL di Lebanon yang diarahkan untuk mengembangkan CBM (Confidence Building Measures) dan menerapkan politik bebas-aktif Indonesia dalam operasi pemeliharaan perdamaian. Tujuannya untuk membangun persepsi kepentingan bersama, merubah mindsets militer dari negara mitra, mendukung perbaikan pertahanan dari negara mitra, dan diplomasi pertahanan dapat mendorong kerjasama dalam bidang lainnya (Umma, 2019).

Negara yang mengirimkan pasukan untuk misi Perdamaian PBB dianggap lebih kooperatif dan berjuang demi kesejahteraan dan kedamaian dunia. Selain itu dengan turut serta menjaga perdamaian, maka nilai dan posisi tawar suatu negara akan menjadi lebih kuat di kancah internasional. Dalam memenuhi target ini diplomasi pertahanan Indonesia diarahkan untuk mempererat hubungan baik antara Indonesia dengan negara kontributor. Dengan demikian ketika semua elemen sudah dipersiapkan maka tinggal menunggu waktu, Indonesia akan mendapat peluang besar dalam kompetisi global (Budyanto Putro Sudarsono, Jonni Mahroza, 2018).

## RESULT AND DISCUSSION

### **Diplomasi Pertahanan Indonesia melalui UNFIL**

Indonesia merupakan negara yang dapat dikatakan cukup aktif dalam memerankan peran-peran yang cukup penting didalam lingkup internasional khususnya dalam misi dari PBB. Perserikatan Bangsa Bangsa atau PBB sendiri merupakan sebuah wadah organisasi internasional yang didalam nya terdapat berbagai macam negara dan tujuannya dalam rangka untuk menciptakan perdamaian, stabilitas, dan juga keamanan bagi para anggota yang terlibat di dalam PBB.

Salah satu instrumen keterlibatan Indonesia di dalam forum PBB dapat terlihat dari sektor keamanan dan perdamaian dunia, Indonesia selaku negara yang menjadi anggota PBB kerap mengirim beberapa Pasukan Perdamaian yang memiliki tujuan untuk menciptakan perdamaian dan juga ketertiban diantara masyarakat dunia serta negara-negara dunia yang memiliki dinamika yang dinamis dan juga kompleks. Salah satu peranan penting perdamaian tersebut dapat terlihat melalui adanya konflik yang terdapat pada negara Lebanon. Lebanon merupakan sebuah negara yang mengalami konflik dengan Israel (Tentara Nasional Indonesia, 2020), dari konflik tersebut berakibat kepada pecahnya suatu eskalasi konflik yang kemudian menjadi sebab diperlukannya untuk menurunkan pasukan perdamaian dari PBB yang bertujuan untuk menstabilkan keadaan tersebut agar tidak pecah konflik lagi.

Salah satunya adalah pasukan perdamaian dari PBB yang bertugas dalam mengamankan misinya ke Lebanon tersebut, nama dari satuan tugas perdamaian itu adalah UNIFIL atau yang disingkat dari United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL, 1978b). Tujuan dari pasukan UNIFIL ini kurang lebih tertulis dalam mandat mereka sendiri yaitu untuk mengawasi mundurnya pasukan Israel dari Lebanon selatan, memonitor tindakan yang mengancam kedaulatan disana, menjaga serta membantu pemerintahan Lebanon yang baru berdiri, dan juga membantu angkatan bersenjata dari Lebanon yang dinamakan Lebanese Armed Forces, yang dimana mereka masih membutuhkan bantuan dalam melakukan restrukturisasi angkatan bersenjata mereka sendiri dan hal tersebut tentunya tak lepas dari pengawasan oleh PBB (UNIFIL, 1978a).

Untuk Indonesia sendiri, pasukan PBB Indonesia yang didelegasikan kepada pasukan UNIFIL di Lebanon di delegasikan kepada pasukan Kontingen Garuda ke-23 (Nailufar, 2020). Pasukan ini dikirim kepada misi untuk melakukan perdamaian di Lebanon yang bertujuan untuk mencegah konflik dan juga menjaga perdamaian dunia. Hal ini mewujudkan partisipasi aktif Indonesia dengan mengirimkan pasukan dalam menjaga perdamaian disana. Pasukan Garuda yang berada disana tidak serta merta ditempatkan hanya dalam rangka untuk menjaga perdamaian tanpa maksud dan artian yang berarti. Pasukan Garuda

Indonesia yang dikirim ke Lebanon sendiri pun memiliki tujuan dan artian yang jelas mengapa mereka dikirim kesana, salah satu bukti kongkret mengapa pasukan Garuda tersebut dikirim kedalam misi UNIFIL dapat dianalisis melalui Defence Diplomacy.

Defence diplomacy adalah suatu upaya dimana titik tumpu yang diletakan sebagai fundamental dasar dari diplomasi ini adalah suatu upaya diplomasi yang bersifat militeristik atau *military diplomacy*, walaupun bersifat militeristik akan tetapi konsep dasar yang digunakan adalah sikap non kekerasan. Caranya yang digunakan melalui program program pendidikan militer, pertukaran perwira dalam rangka untuk belajar sesama perwira kemiliteran, lalu program program yang dimaksud disini melakukan pelatihan gabungan antara satuan dan satuan lainnya diantara pasukan bersenjata tersebut, lalu pertukaran budaya, kunjungan kapal, dan masih banyak lainnya (Muniruzzaman, 2020), kemudian mempromosikan agenda nasional dari negara negara yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam defence diplomacy tersebut. Misi perdamaian ini yang bertujuan untuk mempromosikan perdamaian dan juga mencegah adanya konflik yang lebih berkelanjutan dengan negara negara yang sedang dalam konflik maupun persetujuan (Itsnaini, 2021).

Misi Pasukan Garuda dapat dikatakan sebagai suatu upaya defence diplomacy dikarenakan bahwasannya tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui cara yang halus dan juga melakukan cara-cara yang dapat digunakan secara diplomatis. Indonesia memberikan citra sebagai suatu negara berdaulat akan tetapi juga turut mendukung dengan memiliki atau menekankan eksistensi Indonesia dimata global itu sendiri melalui defence diplomacy ini.

Di lain sisi, alasan mengapa Indonesia juga melakukan Defence diplomacy di sini sebagai wujud dari Indonesia berperan dalam tujuan PBB untuk menjaga perdamaian dunia, Indonesia selaku negara yang merupakan anggota PBB memberikan citra baiknya kepada dunia bahwasannya mereka juga turut menjaga HAM, dengan cara diplomasi berupa pendekatan militer ini, lalu pada akhirnya memunculkan aktor maupun metode baru dalam melakukan soft diplomacy maupun diplomasi publik (Rachmat, 2016). Dari pernyataan Cheyre, *military attaches* menjadi lebih luas salah satunya koordinasi dengan pemerintah dan organisasi internasional untuk mendukung *peacekeeping operations* (PKOs). Indonesia dengan mengirim Kontingen Garuda ke Lebanon artinya sudah turut andil dalam agenda *peacekeeping*. Dengan adanya Kontingen Garuda, seperti yang dikatakan Ebitz, angkatan bersenjata memiliki *key role* dalam penyebaran demokrasi, membangun kekuatan negara mitra melalui hubungan militer-ke-militer, pertukaran personel, dan operasi *humanitarian assistance* (Ebitz, 2019), artinya lewat misi dari PBB Indonesia dan Lebanon secara tidak langsung melakukan dan mempererat kerja sama melalui militer.

Selain itu, partisipasi Indonesia dalam misi di Lebanon juga dapat dilakukan untuk menghindari konflik. Hal ini berhubungan dengan ide Cottey dan Forster mengenai defence diplomacy as conflict prevention. Kedua penulis menyatakan bahwa diplomasi pertahanan dapat digunakan untuk menghindari konflik karena dapat bertindak sebagai simbol kesediaan untuk menjalin kerja sama, saling percaya dan komitmen untuk bekerja mengatasi atau mengelola perbedaan dan dapat mendukung reformasi pertahanan yang spesifik dan konkret di negara mitra, serta bantuan pertahanan dapat digunakan sebagai insentif untuk mendorong kerja sama di bidang lain (Cottey & Forster, 2004).

Keberhasilan defence diplomacy, dalam tulisan penelitian Syawfi, bisa dilihat dari confidence building measures, yaitu dengan membangun hubungan yang baik dengan negara lain, dan dilakukan untuk menurunkan ketegangan atau menghilangkan mispersepsi antar pihak dengan cara saling terbuka dalam kebijakannya (Azhar, Anwar, & Reksoprodjo, 2013). Dengan demikian, negara-negara lain bisa melihat sebenarnya apa yang dilakukan oleh kedua negara tersebut bukanlah suatu ancaman dan memiliki intensi yang baik. Kemudian dari defence diplomacy for defence capabilities, jelas terlihat dari kegiatan yang dilakukan Indonesia dan Lebanon salah satunya adalah pertukaran pelajar (militer) untuk memperkuat kapabilitas pertahanan negara secara material. Terakhir, dari defence diplomacy for industry. Setelah Indonesia meningkatkan kapabilitasnya di bidang militer khususnya pertahanan, kedepannya akan menguntungkan Indonesia supaya tidak ketergantungan dengan negara lain.



Dengan implementasi kebijakan anti-*dumping* UE terhadap impor *velg* mobil asal Tiongkok telah memberikan efek jera bagi para produsen *velg* yang melakukan praktik *dumping*. Di saat bersamaan, UE telah mengatur para pelaku impor *velg* agar mengikut standar harga penjualan yang berlaku di kawasan Eropa. Dari hal ini, produsen dan penjual *velg* mobil lokal turut terpulihkan kesejahteraannya dan produk *velg* mobil lokal dapat mendominasi pasar dengan standar yang berlaku. Implementasi kebijakan anti-*dumping* ini pada waktu-waktu mendatang dapat menjadi bagian dari keberlanjutan aspek penyatu EU sebagai komunitas regional sehingga polemik perekonomian di masa mendatang dapat senantiasa teratasi (Burhan, 2017).

### Rekomendasi Kebijakan

Strategi yang dilakukan Indonesia dalam mengirimkan Kontingen Garuda ke Lebanon lewat UNIFIL atau United Nations Interim Force In Lebanon dikatakan efektif dalam sumbangsuhnya dalam mendukung Peacekeeping Operations (PKOs). Sebelum masuk kedalam rekomendasi kebijakan, sebelumnya mengidentifikasi evaluasi strategi dengan doktrin milik Hanneg, yaitu Ends, Means, dan Ways (Wilson, 2003).

Ends membicarakan apa yang dipertahankan. Dalam studi kasus yang dibicarakan dalam tulisan ini, awal mula adanya konflik perbatasan atau blue line antara Israel dan Lebanon Selatan. Dalam konflik ini berawal dari balas dendam Israel dalam penculikan dua pasukan Israel oleh pasukan Lebanon yang disebut Hizbullah (Nashrullah, 2020) dan semenjak itu terjadi saling serang antara pasukan Israel dan Lebanon dan menyebabkan masalah ini menyebar menjadi konflik wilayah. Hal yang dipertahankan dari strategi ini adalah kedaulatan wilayah dan segala isinya.

Means membicarakan ancaman seperti apa yang muncul, dengan apa mempertahankannya dengan pertahanan militer yang digabungkan dengan pertahanan nir/nonmiliter, dan strategi mana serta modal apa yang digunakan untuk mempertahankan. Dengan apa mempertahankan wilayah Lebanon adalah dengan bekerjasama dengan PBB. PBB membuat satuan tugas untuk Peacekeeping Operations bernama United Nations Interim Force in Lebanon atau UNIFIL. Terdapat 41 negara kontributor pasukan di Lebanon Selatan salah satunya Indonesia.

Ways adalah bagaimana mempertahankan dengan sumber daya yang dimiliki. Mengombinasikan ends dan means untuk menangani ancaman. Apa yang dipertahankan dari UNIFIL adalah wilayah dan segala yang ada didalamnya seperti infrastruktur dan warga sipil. Indonesia mengirim delegasi pasukan ke UNIFIL dengan nama Kontingen Garuda. Kontingen Garuda membantu pasukan Lebanon dengan program pendidikan militer dan pertukaran perwira sehingga meningkatkan pertahanan militer.

Karena diplomasi pertahanan Indonesia sangat berperan dalam membangun kepercayaan, meningkatkan kapabilitas pertahanan Indonesia, serta berperan dalam pengembangan industri pertahanan (Laksamana, 2011). Diplomasi pertahanan berpengaruh besar dalam mewujudkan kepentingan nasional, di antaranya dengan memperkuat tiga peran diplomasi pertahanan Indonesia seperti yang telah disebutkan. Hal tersebut dijelaskan dalam Buku Putih agar kepentingan nasional Indonesia memiliki kedaulatan, bebas dari tekanan politik negara manapun, yang dapat berakibat pada kemungkinan terkena embargo atau pembatasan-pembatasan terhadap peralatan tertentu yang menghambat pembangunan dan pemeliharaan sarana pertahanan (Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2015).

Berikut beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat dirumuskan untuk meningkatkan strategi pertahanan Indonesia melalui diplomasi pertahanan mengacu kepada ends, means, dan ways, serta tiga peran diplomasi pertahanan Indonesia. Rekomendasi kebijakan berfokus kepada bagaimana kepentingan nasional akan diwujudkan, yaitu yang pertama perlu untuk menegakkan kepentingan nasional yang mutlak. Di mana diplomasi pertahanan dilakukan untuk mendukung fungsi pertahanan dalam melindungi kedaulatan dan keutuhan NKRI dari berbagai ancaman. Kedua, perlu meningkatkan kepentingan nasional yang menyangkut pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang menjunjung tinggi toleransi dan demokratis. Hal ini dapat dilakukan dengan cara meningkatkan upaya pencegahan dan penyelesaian konflik

baik di dalam negeri maupun luar negeri. Yang ketiga meningkatkan stabilitas nasional dan regional dengan cara semakin aktif dalam mewujudkan perdamaian dunia. Yang keempat adalah perlunya untuk mengembangkan industri pertahanan domestic, seperti melakukan investasi terhadap keberadaan industri dan penelitian sarana pertahanan tersebut. Hal ini penting agar Indonesia tidak bergantung kepada pasokan alat pertahanan dari luar negeri yang dikhawatirkan dapat membahayakan kepentingan nasional. Langkah-langkah tersebut perlu dilakukan dengan penuh komitmen untuk memenuhi minimum essential force (MEF) dalam rangka meningkatkan kapabilitas pertahanan Indonesia baik di dalam negeri, regional, hingga internasional.

## **CONCLUSION**

Dalam mewujudkan politik luar negeri Bebas dan Aktif, Indonesia telah berpartisipasi dalam berbagai kesepakatan internasional secara bilateral, regional, ataupun multilateral. Partisipasi Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia dicerminkan melalui kontribusinya dalam mengirim Kontingen Garuda (KONGA) ke beberapa wilayah konflik, salah satunya bergabung ke dalam misi UNIFIL di Lebanon. Dalam konteks diplomasi pertahanan, partisipasi Indonesia dalam peacekeeping operations merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kepercayaan dan meningkatkan kapabilitas pertahanan negara. Pengiriman defence attaches (DA), pelatihan bersama, ship visits, kontak MoD merupakan beberapa contoh dari aktivitas dalam diplomasi pertahanan. Partisipasi Indonesia dalam PKO di Lebanon merupakan wujud dari diplomasi pertahanan dan military public diplomacy, karena melalui partisipasi ini, TNI dapat mengembangkan kapabilitas pertahanan, meningkatkan CBM, dan membentuk citra angkatan bersenjata yang baik kepada publik asing.

**REFERENCES**

- Astrina, Retno, A., & Santoso, P. (2012). *Dilema Minimum Essential Force: Studi Minimum Essential Force sebagai Frameworks Kebijakan Pertahanan*.
- Azhar, F., Anwar, S., & Reksoprodjo, A. H. S. (2013). *Diplomasi Pertahanan Indonesia Melalui Lomba Tembak Di Australian Army Skill At Arms Meeting (AASAM)*. 49–73.
- Budyanto Putro Sudarsono, Jonni Mahroza, S. D. W. (2018). *INDONESIA DEFENSE DIPLOMACY IN ACHIEVING NATIONAL INTEREST*. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 69–88.
- Charillon, F., Balzacq, T., & Ramel, F. (2020). *Defense Diplomacy*. In T. Balzacq, F. Ramel, & F. Charillon (Eds.), *Global Diplomacy: An Introduction to Theory and Practice*. Palgrave Macmillan.
- Cheyre, J. E. (2013). Defence Diplomacy. In *The Oxford Handbook of Modern Diplomacy*. Oxford University Press.
- Cottey, A., & Forster, A. (2004). *Reshaping Defence Diplomacy: New Roles for Military Cooperation and Assistance* (T. Huxley, Ed.). New York: Routledge.
- Ebitz, A. (2019). *The use of military diplomacy in great power competition: lessons learned from the Marshall Plan*. Retrieved from Brookings Institute website:  
<https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2019/02/12/the-use-of-military-diplomacy-in-great-power-competition/>

- Embassy of the Republic of Indonesia. (2020). *Indonesia's Contribution to World Peace is Undeniable*. Retrieved from Embassy of the Republic of Indonesia Washington DC website: <https://www.embassyofindonesia.org/indonesias-contribution-to-world-peace-is-undeniable/>
- Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces. (2007). *Defence Attaches*. Retrieved November 14, 2021, from Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces website: <https://www.files.ethz.ch/isn/38583/dcaf-backgrounder-defence-attaches.pdf>
- Inkiriwang, F. W. (2021). 'Garuda shield' vs 'sharp knife': operationalising Indonesia's defence diplomacy. *The Pacific Review*, 34(6).
- Itsaini, F. M. (2021). *Misi Garuda: Peran Indonesia Menjaga Perdamaian Dunia Lewat Kontingen Garuda*. Retrieved November 15, 2021, from DetikNews website: <https://news.detik.com/berita/d-5491938/misi-garuda-peran-indonesia-menjaga-perdamaian-dunia-lewat-kontingen-garuda>
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2015). *Buku Putih Pertahanan Indonesia*. Jakarta: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
- Laksamana, E. A. (2011). *Defence Diplomacy in Southeast Asia: Trends, Prospects and Challenges*. In *From "Boots" to "Brogues": The Rise of Defence Diplomacy in Southeast Asia*. S. Rarajatnam School of International Studies.
- Muniruzzaman, A. N. M. (2020). *Defence Diplomacy: A Powerful Tool of Statecraft*. *CLAWS Journal*, 13(2).
- Nailufar, N. N. (2020). *Kontingen Garuda dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB*. Retrieved November 15, 2021, from KOMPAS.com website: <https://www.kompas.com/skola/read/2020/03/04/160000469/kontingen-garuda-dalam-misi-pemeliharaan-perdamaian-pbb>
- Nashrullah, N. (2020). *Alasan Mengapa Israel Beringas Terhadap Hizbullah di Lebanon*. Retrieved November 29, 2021, from Republika website: <https://www.republika.co.id/berita/qd5a36320/alasan-mengapa-israel-beringas-terhadap-hizbullah-di-lebanon>
- Pramono, B. (2020). *Defense Diplomacy and Country Existence*. *Journal of Defense Resources Management*, 11(2).
- Rachmat, A. N. (2016). *Diplomasi Publik Indonesia melalui Kontingen Garuda/UNIFIL Tentara Nasional Indonesia di Lebanon Selatan*. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional UNPAR*, 12(1), 1–14.

- Samy, M., & Kusumadewi, J. A. (2021). *Diplomasi Pertahanan Militer Indonesia dalam Menghadapi Ancaman Keamanan Non-Tradisional: Upaya Mewujudkan Visi Poros Maritim Dunia*. *Jurnal Hubungan Internasional*, 14(1).
- Saragih, H. M. (2018). *Diplomasi Pertahanan Indonesia dalam Konflik Laut China Selatan*. *Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi*, 8(1).
- Syawfi, I. (2009). *Aktivitas Diplomasi Pertahanan Indonesia dalam Pemenuhan Tujuan-Tujuan Pertahanan*.
- Tan, S. S., & Singh, B. (2012). *Introduction*. *Asian Security*, 8(3).
- Tentara Nasional Indonesia. (2020). *Kontingen Garuda Indobatt XXIII-N/Unifil Cegah Pertikaian Senjata Tentara Israel Dengan Tentara Lebanon di Perbatasan Kedua Negara*. Retrieved November 15, 2021, from Tentara Nasional Indonesia website: <https://tni.mil.id/view-180187-kontingen-garuda-indobatt-xxiii-nunifil-cegah-pertikaian-senjata-tentara-israel-dengan-tentara-lebanon-di-perbatasan-kedua-negara.html>
- Umma, K. (2019). *DIPLOMASI INDONESIA TERHADAP NEGARA KONTRIBUTOR DALAM MISI UNIFIL (UNITED NATIONS INTERIM FORCE IN LEBANON) TAHUN 2016-2018*. 1, 105–112.
- UNIFIL. (1978a). *UNIFIL Mandate*. Retrieved November 15, 2021, from UNIFIL website: <https://unifil.unmissions.org/unifil-mandate>
- UNIFIL. (1978b). *United Nations Interim Force In Lebanon*. Retrieved November 15, 2021, from United Nations Interim Force In Lebanon website: <https://unifil.unmissions.org/>
- United Nations Interim Force in Lebanon. (1978). *UNIFIL Fact Sheet*. Retrieved from United Nations Interim Force in Lebanon website: <https://peacekeeping.un.org/en/mission/unifil>
- Wilson, I. (2003). *Educating the Post-Modern U.S. Army Strategic Planner: Improving the Organizational Construct*.
- Winger, G. (2014). *The Velvet Gauntlet: a theory of defense diplomacy*. *What Do Ideas Do*, 15, 6.